



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 September 2016

Nomor : 03/Bua.6/Hs/SP/IX/2016

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Kepala Pengadilan Militer
Tinggi;
3. Ketua Pengadilan Negeri/
Niaga;
4. Kepala Pengadilan Militer.

di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2016**

TENTANG

**PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN**

Berkenaan dengan banyaknya permohonan dari Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pengadilan untuk mengeluarkan:

1. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
2. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
3. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
4. surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; dan
5. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l, g, h, k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Untuk keseragaman dalam penyelenggaraannya, maka Mahkamah Agung memberikan pedoman sebagai berikut :

1. Syarat tidak sedang dinyatakan pailit :
 - a. pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum pengadilan niaga tempat tinggal pemohon;
 - b. pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, meneliti Register Induk Kepailitan dan Register Induk PKPU selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.
2. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya :
 - a. bagi pemohon yang berasal dari sipil mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
 - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas, meneliti Register Induk Perkara Pidana Biasa, Register Induk Perkara Pidana Singkat, Register Perkara Pidana Cepat selanjutnya mengeluarkan surat keterangan;
 - c. bagi pemohon yang berasal dari militer mengajukan permohonan ke pengadilan militer dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
 - d. pengadilan militer sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas, meneliti Register Induk Perkara Pidana selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.
3. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik :
 - a. bagi pemohon yang berasal dari sipil mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik;
 - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a di atas, meneliti Register Perkara Pidana Cepat dan Register Induk Perkara Pidana Biasa selanjutnya mengeluarkan surat keterangan;

- c. bagi pemohon yang berasal dari militer mengajukan permohonan ke pengadilan militer yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik;
 - d. pengadilan militer sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c di atas, meneliti Register Induk Perkara Pidana selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.
4. Syarat tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara :
- a. pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
 - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a di atas, meneliti Register Induk Perkara Perdata Gugatan selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.
5. Surat permohonan pemohon dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/niaga/militer menggunakan formulir yang terlampir dalam surat edaran ini.
6. Penyelesaian permohonan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima oleh pengadilan.
7. Pemberian surat keterangan diberikan tanpa dipungut biaya.
8. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

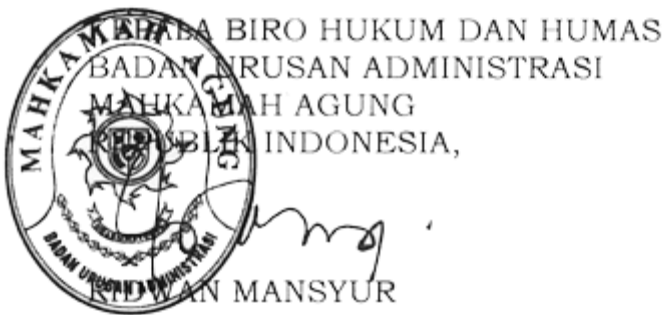
ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
10. Ketua Badan Pengawas Pemilu.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN I :
FORMULIR PERMOHONAN KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

.....,

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri

Di-

.....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tgl. Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

.....

.....

Dengan ini mohon perkenan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri..... kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya hingga saat ini tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya pergunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menjadi Calon.....

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

(.....)

LAMPIRAN II :
FORMULIR PERMOHONAN KETERANGAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA

.....,

Kepada Yth,
Ketua/Kepala Pengadilan

.....

Di-

.....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Dengan ini mohon perkenan Ketua/Kepala Pengadilan..... kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya hingga saat ini tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya pergunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menjadi Calon.....

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

(.....)

LAMPIRAN III :
FORMULIR PERMOHONAN KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

.....,

Kepada Yth,
Ketua/Kepala Pengadilan

.....

Di-

.....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat dan Tgl. Lahir	:	
Agama	:	
Jenis Kelamin	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
		
		

Dengan ini mohon perkenan Ketua/Kepala Pengadilan..... kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya pergunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menjadi Calon.....

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

(.....)

LAMPIRAN IV :
FORMULIR PERMOHONAN KETERANGAN
DIPIDANA KARENA KEALPAAN RINGAN
(*CULPA LEVIS*) ATAU ALASAN POLITIK

.....,

Kepada Yth,

Ketua/Kepala Pengadilan

.....

Di-

.....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tgl. Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

.....

.....

Dengan ini mohon perkenan Ketua/Kepala Pengadilan..... kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya pernah dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya pergunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menjadi Calon.....

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

(.....)

LAMPIRAN V :
FORMULIR PERMOHONAN KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG
SECARA PERORANGAN DAN/ATAU SECARA
BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG
JAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA

.....,

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
.....

Di-

.....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Dengan ini mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri..... kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya hingga saat ini tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab saya yang merugikan keuangan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya pergunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menjadi Calon.....

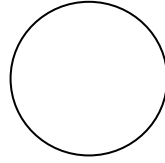
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

(.....)

LAMPIRAN VI :
SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT



KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Nomor :

Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri menerangkan bahwa:

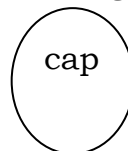
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Kepailitan pengadilan dan Register Induk PKPU pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

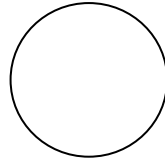
.....,

Ketua Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri.....



(.....)

LAMPIRAN VII :
SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH
SEBAGAI TERPIDANA



KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA

Nomor:

Ketua/Kepala Pengadilan..... menerangkan bahwa :

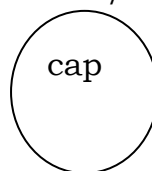
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

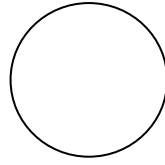
.....,

Ketua/Kepala Pengadilan.....



(.....)

LAMPIRAN VIII :
SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH



KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Nomor:

Ketua/Kepala Pengadilan..... menerangkan bahwa :

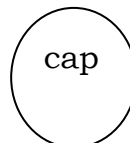
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

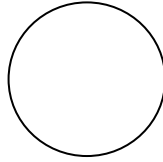
.....

Ketua/Kepala Pengadilan.....



(.....)

LAMPIRAN IX :
SURAT KETERANGAN PERNAH SEBAGAI
TERPIDANA KARENA KEALPAAN RINGAN
(*CULPA LEVIS*) DAN/ATAU ALASAN POLITIK



KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN
PERNAH SEBAGAI TERPIDANA KARENA KEALPAAN RINGAN (*CULPA LEVIS*)
DAN/ATAU ALASAN POLITIK

Nomor:

Ketua/Kepala Pengadilan..... menerangkan bahwa :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

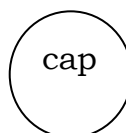
Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah di pidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan Register Perkara Pidana, dengan amar putusan sebagai berikut :

“ ”
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

.....

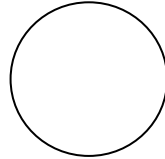
Ketua/Kepala Pengadilan.....



cap

(.....)

LAMPIRAN X :
SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI
TANGGUNGAN UTANG SECARA
PERORANGAN DAN/ATAU SECARA BADAN
HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG
JAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA



KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAU
SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Nomor:

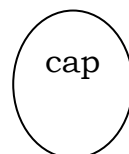
Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Perdata pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

.....
Ketua Pengadilan Negeri.....



(.....)